



Article history:

Submitted: 09-10-2025

Received: 22-10-2025

Revised: 23-10-2025

Accepted: 24-10-2025

Peran Manajemen SDM Aparatur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat: Analisis Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Kediri

Mohammad Robi Ardana*, Endah Kurniawati

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

*Correspondence: robiardana23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan data Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR) Kota Kediri periode 2022–2024. Data penelitian diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif melalui pendekatan tren. Indikator utama yang dianalisis meliputi partisipasi sekolah, kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren positif pada hampir semua indikator. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran aparatur dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: manajemen SDM aparatur, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, Kota Kediri

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of human resource management of civil servants in improving public welfare using data from the People's Welfare Indicator of Kediri City for the 2022–2024 period. The research data was obtained from the official publication of the Central Statistics Agency and analyzed using a quantitative descriptive method through a trend approach. The main indicators analyzed include school participation, Social Security Administering Body membership for Contribution Assistance Recipients (PBI), Labor Force Participation Rate, and Poverty Rate. The results of the study show a positive trend in almost all indicators. These results indicate that the role of civil servants in education, health, employment, and economic empowerment services has a significant contribution to improving public welfare.

Keywords : *civil servant HR management, public welfare, education, health, poverty, Kediri City*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah, sekaligus mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKR) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu ukuran makro yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup secara umum. Peningkatan kesejahteraan rakyat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik (Aprila et al., 2023; Yentifa et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Bank Dunia (2023) bahwa keberhasilan pembangunan inklusif di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kapasitas birokrasi daerah dalam mengelola sumber daya yang ada secara efektif. Dengan demikian, isu mengenai peran manajemen SDM aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi relevan baik pada level nasional maupun lokal, termasuk di Kota Kediri yang tengah berupaya meningkatkan IKR melalui berbagai program pembangunan.

Fenomena tersebut penting untuk dikaji karena manajemen SDM aparatur tidak hanya menyangkut rekrutmen, pelatihan, maupun pengembangan karier pegawai negeri, tetapi juga berkaitan dengan strategi peningkatan kinerja organisasi publik agar mampu memberi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perspektif teori *human capital* (Becker, 1993), kualitas SDM yang terkelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas organisasi, termasuk birokrasi publik. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat pada masyarakat (Mossa & Setiawan, 2023; Zulaikah, 2020). Dengan demikian, efektivitas manajemen SDM aparatur dapat dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba melihat keterkaitan antara SDM aparatur dan pelayanan publik. Misalnya, penelitian Sugiyanto et al (2025) yang meneliti penilaian kinerja ASN dalam administrasi kependudukan di Kecamatan Cibirong dan menemukan bahwa efektivitas pelayanan publik dipengaruhi oleh kualitas kinerja ASN, khususnya dalam hal ketepatan layanan administratif dan pengelolaan proses internal. Kemudian penelitian Saharuddin & Jafar (2023) menambahkan bahwa pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, penelitian Aini (2019) yang mengevaluasi kinerja pegawai dalam perspektif *good governance* di Malang menekankan pentingnya akuntabilitas, kecepatan layanan, dan integritas sebagai faktor penentu persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pelayanan atau kinerja birokrasi, dan belum secara spesifik menghubungkan peran manajemen SDM aparatur dengan indikator makro seperti IKR yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan manajemen SDM aparatur dengan capaian kesejahteraan rakyat, dengan menggunakan IKR sebagai instrumen analisis. Pendekatan ini sejalan dengan teori *public value* (Moore, 1995) yang menekankan bahwa nilai publik dapat diwujudkan apabila birokrasi mampu mengelola SDM secara efektif untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Dengan mengintegrasikan perspektif manajemen SDM dan indikator kesejahteraan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat literatur mengenai hubungan antara kinerja aparatur dan *outcome* sosial-ekonomi masyarakat. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan SDM yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian yang dilakukan sekarang ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen SDM aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan merujuk pada Indeks Kesejahteraan Rakyat di Kota Kediri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menganalisis fenomena manajemen SDM dalam konteks birokrasi daerah serta menghubungkannya dengan indikator kesejahteraan agregat yang tercermin dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKR) Kota Kediri (Sugiyono, 2024; Tobing & Sagala, 2024). Subjek penelitian meliputi dokumen kebijakan dan program terkait manajemen SDM aparatur pada perangkat daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), dan laporan kepegawaian. Selain itu, data IKR Kota Kediri digunakan sebagai indikator capaian kesejahteraan rakyat (BPS Kota Kediri, 2023). Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder kuantitatif dan data kualitatif. Data sekunder kuantitatif berupa publikasi resmi BPS mengenai Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kediri periode 2022–2024 yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kondisi perumahan. Rentang waktu tersebut dipilih karena merepresentasikan data terbaru sekaligus mencerminkan kondisi pascapandemi Covid-19 hingga fase pemulihan ekonomi daerah. Sementara itu, data kualitatif diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah daerah seperti RPJMD, rencana strategis (renstra) OPD, laporan kepegawaian, serta literatur ilmiah yang relevan mengenai manajemen SDM aparatur.

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) teknik utama. Pertama, dokumentasi dengan mengumpulkan data dari publikasi resmi BPS (IKR Kota Kediri 2022–2024), dokumen pemerintah daerah, serta regulasi yang berhubungan dengan manajemen SDM aparatur. Kedua, studi literatur melalui telaah artikel ilmiah, laporan penelitian, dan teori yang relevan untuk mendukung analisis

hubungan antara manajemen SDM aparatur dan kesejahteraan masyarakat (Andriani, 2023). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif melalui 3 (tiga) tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni menyeleksi informasi yang relevan dari publikasi IKR 2022–2024, dokumen pemerintah daerah, dan literatur akademik. Tahap kedua berupa penyajian data yang disusun dalam bentuk tabel dan grafik perkembangan IKR Kota Kediri pada periode 2022–2024 disertai dengan deskripsi kebijakan manajemen SDM aparatur. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi hubungan antara kebijakan atau praktik manajemen SDM aparatur dengan capaian kesejahteraan masyarakat, dengan mengacu pada kerangka teori human capital (Becker, 1993) dan *public value* (Moore, 1995). Untuk meningkatkan kredibilitas hasil, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber dengan membandingkan data BPS, dokumen pemerintah daerah, dan literatur akademik (Andriani, 2024; Paska et al., 2024).

HASIL

Tabel 1
Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Kediri 2022–2024 (dalam persentase)

No.	Indikator	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Partisipasi Sekolah			
	Usia 7–12 tahun	99.8	99.9	99.9
	Usia 13–15 tahun	84.8	85.2	86.0
	Usia 16–18 tahun	87.0	87.5	88.2
2	Kepesertaan BPJS PBI	41.7	43.1	44.5
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.9	77.5	78.1
4	Tingkat Kemiskinan	7.2	7.0	6.8

Sumber: BPS Kota Kediri

Tabel 1 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk anak usia 7–12 tahun berada di atas 99% dan konsisten tidak mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan efektivitas aparatur pemerintah daerah dalam menjaga akses pendidikan dasar yang merata. Namun, tantangan terlihat pada kelompok usia 13–15 tahun dan 16–18 tahun. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi dari 84,8% (2022) menjadi 86,0% (2024) pada usia 13–15 tahun dan dari 87,0% menjadi 88,2% pada usia 16–18 tahun, angka tersebut masih menunjukkan adanya kerentanan putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Meskipun indikator kesejahteraan rakyat Kota Kediri menunjukkan tren positif pada periode 2022–2024, terdapat sejumlah tantangan yang masih menghambat pencapaian kesejahteraan yang merata. Pada sektor pendidikan, tantangan terbesar adalah masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada usia 13–15 tahun dan 16–18 tahun. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan akses ke sekolah menengah atas, serta motivasi belajar yang rendah menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peran aparatur tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga pada pendampingan, program remedial, dan intervensi sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan tetap bersekolah. Kondisi ini menuntut penguatan manajemen SDM aparatur, terutama guru dan tenaga kependidikan, agar lebih adaptif dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif. Teori *human capital* (Becker, 1993) menegaskan bahwa kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan produktivitas masyarakat di masa depan.

Aspek kesehatan, indikator kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) memperlihatkan tren positif. Pada tahun 2022, sebanyak 41,7% penduduk Kota Kediri tercatat sebagai peserta PBI, dan angka ini meningkat menjadi 44,5% pada 2024. Peningkatan kepesertaan menunjukkan adanya upaya perluasan cakupan perlindungan sosial yang dikelola oleh aparatur daerah melalui program kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat. Kenaikan ini juga menggambarkan kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Meski demikian, capaian tersebut masih menyisakan kelompok masyarakat non-PBI yang belum tercakup secara penuh, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Hal ini menegaskan perlunya strategi manajemen SDM aparatur yang lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi, pendataan, dan kolaborasi lintas sektor agar jaminan kesehatan benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketidakterataan akses fasilitas kesehatan antara wilayah pusat kota dan pinggiran juga menambah persoalan. Aparatur perlu

memperkuat sistem pendataan terpadu dan memperluas cakupan layanan kesehatan berbasis komunitas. Selain itu, dibutuhkan inovasi pelayanan kesehatan digital untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit terakses.

Kemudian, kondisi ketenagakerjaan di Kota Kediri menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dengan tren meningkat pada tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada tahun 2022, TPAK tercatat sebesar 76,9% dan meningkat menjadi 78,1% pada tahun 2024. Tren ini menandakan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja, sebuah fenomena yang perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah dominasi sektor informal yang cenderung tidak memberikan perlindungan sosial maupun jaminan kesejahteraan yang memadai. Dari perspektif manajemen, aparatur pemerintah perlu mengarahkan program pelatihan vokasional dan sertifikasi keterampilan agar tenaga kerja dapat terserap lebih optimal pada sektor formal. Hal ini sejalan dengan penelitian Aminah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan karier dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, sehingga praktik serupa dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat secara umum.

Terakhir indikator kemiskinan menjadi aspek krusial yang menggambarkan outcome langsung dari berbagai kebijakan pembangunan. Data menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 7,2% pada 2022 menjadi 6,8% pada 2024. Meskipun laju penurunannya relatif moderat, tren ini menunjukkan adanya kontribusi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. Program bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi intervensi yang mendukung. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kapasitas manajemen SDM aparatur dalam mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program agar tepat sasaran. Penelitian Saharuddin & Jafar (2023); Leonita (2020) juga menegaskan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja aparatur, yang dalam konteks penelitian ini berarti semakin baik kapasitas aparatur, semakin efektif pula strategi pengentasan kemiskinan yang mereka jalankan.

Aparatur pemerintah harus dilatih tidak hanya dalam hal administratif, tetapi juga dalam manajemen berbasis data, analisis kebijakan, serta pelayanan publik berbasis teknologi digital. Reformasi birokrasi di tingkat daerah perlu diarahkan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Pendekatan *public value* (Moore, 1995) dapat dijadikan landasan, yakni bahwa keberhasilan aparatur bukan hanya diukur dari output administratif, tetapi dari seberapa besar mereka mampu menciptakan nilai publik berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKR) Kota Kediri pada periode 2022–2024 mengalami peningkatan moderat di berbagai aspek utama. Tingkat partisipasi sekolah berada pada level yang relatif tinggi dengan tren positif, khususnya pada kelompok usia 13–15 tahun dan 16–18 tahun. Cakupan kepesertaan BPJS PBI meningkat dari 41,7% pada 2022 menjadi 44,5% pada 2024, mencerminkan efektivitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan kenaikan dari 76,9% menjadi 78,1%, sementara angka kemiskinan menurun dari 7,2% menjadi 6,8%. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa peran manajemen SDM aparatur, khususnya dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengentasan kemiskinan, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671>
- Aminah, A., Khotimah, K., Irawan, A., Mustajab, D., 2024. Pengaruh Kompetensi, Pengembangan Karir dan Kepuasan kerja terhadap Kinerja Pegawai. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(3), 219–237.
- Andriani, W., 2023. Comprehensive Budget Model as a Business Planning Tool. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship (IJGAME2)*, 4(1), 95–102.
- Andriani, W., 2024. Reviewing the Accountability Practices of Village Funds: Case Study from

- Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 50–57.
- Aprila, D., Andriani, W., Ananto, R. P., 2023. Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225.
- Becker, G. S., 1993. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 3rd ed. The University of Chicago Press.
- Leonita, N., 2020. Determinasi Pengembangan Karier Dan Kinerja Pegawai Kompetensi Dan Beban Kerja (Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(2), 155–167.
- Mossa, Y. J., Setiawan, N., 2023. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan pada Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 17(2), 227–240.
- Moore, M. H., 1995, *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press, London.
- Paska, Y. A., Atmaja, H. E., Ratnawati, S., 2024. Meningkatkan Kinerja Karyawan: Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, Motivasi, Gaya Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja dalam Perspektif Tinjauan Literatur. *YUME : Journal of Management*, 7(3), 1887–1896.
- Saharuddin, S., Jafar, S., 2023. Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Aparatur Terhadap Kinerja Aparatur Biro Hukum dan HAM SETDA Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Global*, 5(2), 65–72.
- Sugiyanto, S., Rahmawati, R., Suarman, A., 2025. Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Kecamatan Cibinong. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(4), 2788–2799.
- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, M. S. R. L., Sagala, E., 2024. Analisis Pengaruh Kompetensi dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai PT. PLN (Persero) UID Sumut. *Jurnal Arastirma*, 4(2), 532–545.
- World Bank. 2023. *Indonesia: World Bank Program to Support More Efficient Local Government Spending*.
- Yentifa, A., Andriani, W., Jr, S. R., Aprila, D., Sofia, G., 2023. Village Fund Accounting Model in Realizing Nagari Financial Accountability. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 716–729.
- Zulaikah, S., 2020. Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. *Revitalisasi*, 8(1), 85.